

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SIDOARJO UTARA**

Mirdad¹, Nur Diana², Junaidi²

¹)Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Islam Malang

²)Dosen Program Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam
Malang

Email : mirdad721@gmail.com

Jalan Mt Haryono 193, Malang ,65144, Indonesia

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the effect of modernization of tax administration system on taxpayers compliance level in Tax Service Office Pratama Sidoarjo North. The population of this study is Taxable Employers registered in Tax Office Pratama Sidoarjo North. amounted to 223 people. This method uses the method of Convenience sampling method with 46 respondents. This study uses primary data obtained through questionnaires. To test the relation of organizational structure, organizational procedure, organizational strategy and organizational culture to the level of taxable employer compliance, multiple linear regression tests were used through SPSS software Ver 14. The result of the research shows that the variable of organizational structure has an effect on to the level of compliance of taxable entrepreneur while the variable of procedure, organization, organizational strategy and organizational culture have no effect on taxpayer compliance level.

Keywords: *Modernization of tax administration system, organizational structure, organization procedure, organizational strategy, and organizational culture, taxable entrepreneur.*

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan mempunyai peran penting untuk pembangunan negara yang harus di kelola dengan baik dan benar. Untuk itu pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya untuk senantiasa meningkatkan penerimaan negara dari sektor publik. Hingga saat ini sebesar 75% APBN Indonesia dibiayai dari pendapatan sektor pajak yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2016, angka ini mengalami kenaikan hampir 30% dari realisasi tahun sebelumnya (Hidayat, 2016).

Menurut Sari (2013;19) Sasaran penerapan sistem administrasi pajak modern antara lain yaitu, peningkatan yang maksimal dalam penerimaan sektor pajak, serta memberikan pelayanan yang optimal dalam mendukung tingkat kepatuhan wajib pajak, dan diberikan jaminan dan mutu kepada publik bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan tanggung jawab baik dalam segi integritas, keadilan yang menjunjung tinggi, keadilan dan memperlakukan persamaan baik proses pemungutan pajak, dan pegawai pajakpun dianggap sebagai sumber daya memiliki motivasi yang tinggi, serta kompeten dan professional dalam melaksanakan tugasnya, dan wajib pajakpun memiliki alat dalam mekanisme untuk mendapatkan akses informasi yang ia perlukan serta optimalisasi dalam pencegahan terjadinya penggelapan dan penyalahgunaan pajak.

Program dari kegiatan reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang dimiliki khusus diantara lain meliputi struktur organisasi yang berdasarkan fungsi dan perbaikan bagi pelayanan dari setiap wajib pajak melalui dengan pembentukan *account representative* serta *complaint center* supaya menampung keberatan dari wajib pajak. Selain itu, di dalam sistem administrasi perpajakan modern juga merangkul kemajuan teknologi dengan memberikan pelayanan yang berbasis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Payment*, dan *e-Registration* sebagai harapan untuk meningkatkan mekanisme dalam mengontrol yang lebih efektif ditunjang dalam penerapan kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mengatur perilaku pegawai dalam melakukan tugas dan wewenang dalam pelaksanaan *good governance*.

TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian ini untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan meliputi struktur

organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, budaya organisasi terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

TINJAUAN TEORI

Perpajakan

Pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Menurut Nasucha (2004:37) sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat.

Kepatuhan Pajak (*Tax compliance*)

Menurut Kurnia (2010:138) kepatuhan dapat diartikan sebagai suatu keadaan, wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban dalam perpajakan, melaksanakan hak dalam perpajakannya.

Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha melakukan penyerahan barang kena pajak dan /atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai tidak termasuk pengusaha kecil yang batasnya ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK-197/PMK.03/2013 Pasal 7, kecuali terdapat pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Pengusaha kecil diperkenalkan untuk mengukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) apabila pengusaha tersebut memilih menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

POPULASI DAN SAMPEL

Populasi

Populasi dalam penelitian ini diperoleh jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar tahun 2017 sebanyak 223 orang.

Sampel

Menurut Arikunto (2010: 112) jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10- 15% atau 20 -25% atau lebih. Jadi untuk penentuan sampel dalam penelitian ini adalah $n = 25\% \times 223 = 55,75\%$ dari jumlah populasi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Jadi jumlah penyebaran kuesioner yang disebar oleh peneliti adalah 60 kuesioner.

DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL

a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah unsur yang berkaitan dengan pola-pola peran yang sudah ditentukan dan hubungan antar peran, alokasi kegiatan kepada sub unit-sub unit terpisah, pendistribusian wewenang di antara posisi administratif, dan jaringan komunikasi formal dan bentuk layanan kepada masyarakat dengan memperbarui jalur penyelesaian pelayanan kepada wajib pajak. Untuk menilai sikap peneliti menggunakan kuesioner yang dipilih dari peneliti sebanyak 3 item pertanyaan, instrumen ini diukur dengan menggunakan skala likert lima poin mulai dari sangat setuju (SS), setuju (S), netral (N), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS).

b. Prosedur Organisasi.

Prosedur organisasi berkaitan dengan proses komunikasi, pengambilan keputusan, pemilihan prestasi dan sosialisasi. Pembahasan dan pemahaman prosedur organisasi berpijak pada aktivitas organisasi yang dilakukan secara teratur. Bentuk pelayanan yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi yang diterapkan pada kantor-kantor pusat seperti e-SPT, pembayaran secara *online*, juga pelaporan pajak elektronik akan memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan, pembayaran dan pendaftaran, sehingga dengan bentuk pelayanan tersebut diharapkan akan dapat mempengaruhi kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Untuk menilai sikap peneliti menggunakan kuesioner yang dipilih dari peneliti sebanyak 3 item pertanyaan, instrumen ini diukur dengan menggunakan skala likert lima poin mulai dari sangat setuju (SS), setuju (S), netral (N), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS).

c. Strategi Organisasi.

Strategi organisasi dipandang sebagai siasat, sikap pandangan dan tindakan yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan, faktor, peluang, dan sumber daya yang ada sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan berhasil dan selamat. Strategi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola arus keputusan yang bermakna. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari modernisasi sistem administrasi perpajakan. Standar kualitas pelayanan yang maksimal kepada Wajib Pajak akan terpenuhi apabila sumber daya manusianya dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, bertanggung jawab, disiplin, dan transparan. Untuk menilai sikap peneliti menggunakan kuesioner yang dipilih dari peneliti sebanyak 4 item pertanyaan, instrumen ini diukur dengan menggunakan skala likert lima poin mulai dari sangat setuju (SS), setuju (S), netral (N), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS).

d. Budaya Organisasi.

Budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Budaya organisasi mewakili

persepsi umum yang dimiliki oleh anggota organisasi. Pelayanan yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada masyarakat dengan penerapan tata kelola yang baik dalam pelaksanaan tugasnya. Membangkitkan kesadaran dan memotivasi aparatur pajak untuk menjadi aparatur Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bersih, adil, dan jujur, ketegasan serta menjunjung nilai-nilai moral dan etika dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai undang-undang yang berlaku. Untuk menilai sikap peneliti menggunakan kuesioner yang dipilih dari peneliti sebanyak 2 item pertanyaan, instrumen ini diukur dengan menggunakan skala likert lima poin mulai dari sangat setuju (SS), setuju (S), netral (N), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS).

e. Kepatuhan Pengusaha Kena pajak

Terkait dengan kepatuhan untuk mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak. *Good governance* merupakan bentuk pelayanan yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada masyarakat dengan penerapan tata kelola yang baik dalam pelaksanaan tugasnya. Membangkitkan kesadaran dan memotivasi aparatur pajak untuk menjadi aparatur Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bersih, adil, dan jujur, serta menjunjung nilai-nilai moral dan etika merupakan langkah awal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Wajib pajak akan merasa aman untuk melakukan pembayaran pajaknya tanpa harus takut pembayaran pajak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi sehingga diharapkan dengan bentuk pelayanan tersebut akan dapat mempengaruhi kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Untuk menilai sikap peneliti menggunakan kuesioner yang dipilih dari peneliti sebanyak 9 item pertanyaan, instrumen ini diukur dengan menggunakan skala likert lima poin mulai dari sangat setuju (SS), setuju (S), netral (N), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode pengambilan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuisoner yang di sebar secara langsung kepada wajib pajak (pengusaha kena pajak) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara. Berdasarkan kuisoner yang sudah di sebar maka hasil tersebut adalah :

Tabel 4.1 Rincian Penyebaran Kuisoner

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Kuesioner yang disebar	60	100%
2	Kuesioner yang kembali	55	91.7%
3	Kuesioner yang tidak kembali	5	8.3%
4	Kuesioner yang tidak lengkap	9	10%
5	Kuesioner yang dapat diolah	46	76.7%

Sumber: Data diolah, 2018

1. Uji deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
Struktur Organisasi	46	3	5	4.23	659
Prosedur Organisasi	46	2	5	3.88	850
Strategi Organisasi	46	2	5	3.67	893
Budaya Organisasi	46	3	5	4.15	674
Valid N (listwise)	46	3	5	3.99	417

Tabel 1. diperoleh informasi bahwa pada variabel struktur organisasi responden memberikan total jawaban minimum sebesar 3 dan maksimum sebesar 5 dengan nilai rata-rata 4,23, serta standar deviasi sebesar 659. Untuk variabel prosedur organisasi responden memberikan total jawaban minimum sebesar 2 dan maksimum sebesar 5 dengan nilai rata-rata 3,88, serta standar deviasi sebesar 850. variabel strategi organisasi responden memberikan total jawaban minimum sebesar 2 dan maksimum sebesar 5 dengan nilai rata-rata 3,67, serta standar deviasi sebesar 893. variabel budaya organisasi responden memberikan total jawaban minimum sebesar 3 dan maksimum sebesar 5 dengan nilai rata-rata 4,15, serta standar deviasi sebesar 674. untuk tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak responden memberikan total jawaban minimum sebesar 3 dan maksimum sebesar 5 dengan nilai rata-rata 3,99, serta standar deviasi sebesar 417.

2. Hasil Uji Instrumen Penelitian

Tabel 2 Uji Validitas

Variabel	Item	Koefisien r	Keterangan
Struktur Organisasi (X1)	X1.1	0,706	Valid
	X1.2	0,847	Valid
	X1.3	0,727	Valid
Prosedur Organisasi (X2)	X2.1	0,681	Valid
	X2.2	0,791	Valid
	X2.3	0,855	Valid
Strategi	X3.1	0,596	Valid

Organisasi (X3)	X3.2	0,708	Valid
	X3.3	0,725	Valid
	X3.4	0,718	Valid
Budaya Organisasi (X4)	X1	0,906	Valid
	X2	0,882	Valid
Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Y)	Y1.1	0,444	Valid
	Y1.2	0,624	Valid
	Y1.3	0,600	Valid
	Y1.4	0,687	Valid
	Y1.5	0,687	Valid
	Y1.6	0,668	Valid
	Y1.7	0,444	Valid
	Y1.8	0,600	Valid
	Y1.9	0,687	Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2018

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Cronbach Alpha	Keterangan
Struktur Organisasi (X1)	0,621	Reliabel
Prosedur Organisasi (X2)	0,613	Reliabel
Strategi Organisasi (X3)	0,629	Reliabel
Budaya Organisasi (X4)	0,748	Reliabel
Tingkat Kepatuhan Pengusaha kena pajak (Y)	0,773	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah, 2018

Tabel 4 Uji Normalitas dengan uji kolmogorov-Smirnov Test

Variabel	Kolmogorov Smirnov Z	Nilai Sig.	Keterangan
Struktur Organisasi	1,152	0,140	Berdistribusi Normal
Prosedur Organisasi	990	0,281	Berdistribusi Normal
Strategi Organisasi	819	0,513	Berdistribusi Normal
Budaya Organisasi	1,134	0,124	Berdistribusi Normal
Tingkat Kepatuhan PKP	919	0,367	Berdistribusi Normal

3. Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	19.796	5.104		3.879	.000
X1	.746	.266	.392	2.809	.008
X2	.143	.216	.097	.663	.511
X3	.041	.153	.039	.267	.790
X4	.522	.385	.187	1.356	.182

a. Dependent Variable: Y

Model regresi berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y = 19.796 + 0,746X_1 + 0,143X_2 + 0,041X_3 + 0,522X_4 + e$$

(Sig 0,008) (Sig.0,511) (Sig 0,790) (Sig 0,182)

4. Hasil uji Parsial (Uji t)

1. Variabel X1 (Struktur Organisasi)

Variabel X1 memiliki nilai statistik uji t sebesar 2,809 dan nilai signifikan $0,008 < 0,05$. Artinya H_1 diterima H_0 di tolak maka variabel struktur organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y (tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak). Dengan adanya *Account Representative* telah memberikan kemudahan kepada Pengusaha Kena Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu H_1 dalam penelitian ini dapat diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmayan dan setiawan (2016) dan Aminah (2014) yang menyatakan bahwa struktur organisasi memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak.

2. Variabel X2 (Prosedur Organisasi)

Variabel X2 memiliki nilai statistik uji t sebesar 0,663 dan nilai signifikan $0,511 > 0,05$. Artinya H_1 ditolak dan H_0 diterima maka prosedur organisasi berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiana, Dkk (2010) dan Misheryanto (2016) yang menyatakan bahwa prosedur organisasi atau yang didalamnya ada dimensi proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Variabel X3 (Strategi organisasi)

Variabel X3 memiliki nilai statistik uji t sebesar 0,267 dan nilai signifikan $0,790 > 0,05$ Artinya H_1 ditolak dan H_0 diterima, maka strategi organisasi berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Penelitian ini konsisten sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Aminah (2014).

4. Variabel X4 (Budaya organisasi)

Variabel X4 memiliki nilai statistik uji t sebesar 1,356 dan nilai signifikan $0,182 > 0,05$. Artinya H_1 ditolak dan H_0 diterima, Sehingga budaya organisasi berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. Penelitian ini konsisten dengan penelitian Aminah (2014).

Kesimpulan

1. Hasil Analisis Regresi Berganda menunjukan bahwa variabel struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi secara simultan pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak.
2. Berdasarkan analisis regresi berganda dengan menggunakan Uji t (Secara Parsial) dapat disimpulkan:
 - a. Modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam hal yaitu struktur organisasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak pratama (KPP) Sidoarjo Utara.
 - b. Modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam hal yaitu prosedur organisasi berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Sidoarjo Utara.
 - c. Modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam hal yaitu strategi organisasi berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Sidoarjo Utara.
 - d. Modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam hal yaitu budaya organisasi berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Sidoarjo Utara.

Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada bab IV diperoleh adanya keterbatasan sebagai berikut :

1. Selama proses penyebaran kuesioner terhambat mengingat kesibukan wajib pajak/ Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga responden yang diharapkan untuk mengisi kuesioner menjadi tidak ada atau kurang lengkapnya dari pengisian kuesioner ini.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana penerapan sistem administrasi perpajakan modern di kantor Pelayanan Pajak Pratama

Sidoarjo Utara yang meliputi hal struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak/ pengusaha kena pajak.

3. Peneliti hanya mengkaji pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak tanpa mengukur tingkat kepatuhan sebelum dan sesudah diterapkannya modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Saran

1. Sebaiknya untuk peneliti selanjutnya untuk teknik pengumpulan data disamping penyebaran kuesioner ditambah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi supaya mendapatkan data dari responden/ sampel penelitian sehingga meminimalisir kurang lengkapnya dari pengisian kuesioner.
2. Sebaiknya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara menetapkan prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi dari KPP modern secara menyeluruh serta implikasi yang dapat mempengaruhi kepatuhan pengusaha kena pajak.
3. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menambah variabel dan menguji aspek lain dalam modernisasi perpajakan seperti kualitas layanan, pemanfaatan teknologi seperti *e-filling* dalam perpajakan dalam upaya meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S. (2014). *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Surakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fajar, Amalia Rezeki. 2017. *Skripsi pengaruh modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan*.
- Fasmi, L., & Misra, F. (2012). *Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di kantor pelayanan pajak (KPP) pratama Padang*. Jurnal Ekonomi.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ir. Syofian siregar, M.M. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana
- Marcus, Taufan. 2005, *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar*. Jurnal Perpajakan Indonesia.
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*”, Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Per 30 November 2015. <http://www.pajak.go.id/contect> artikel/realisasi penerimaan pajak. Diakses 05 April 2017.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metode Penelitian Untuk Bisnis Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Trigawati, 2013. *Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)*.
- Timbul, Hamonangan. & Imam, Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Bogor: Penerbit Raih Asa Sukses.
- Veronica, Carolina. 2009. *Pengetahuan Pajak*. Diambil dari: <http://www.google.com> pada tanggal 15 November 2017.